

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP) BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER
DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
TAHUN 2025**



**BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA
ALAM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
TAHUN 2025**

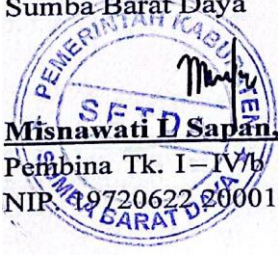
KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja dan implementasi *good governance* terhadap publik dan *stakeholders*. Penyusunan laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran capaian kinerja secara terperinci yang dilakukan oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun Anggaran 2025. Laporan Kinerja ini juga sebagai instrumen umpan balik untuk melakukan perbaikan dan perencanaan tahun depan terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Akhirnya kami berharap LKIP ini dapat memberikan kontribusi sebagai media informasi dan bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Tambolaka, Februari 2025
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber
Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumba Barat Daya


Misnawati D Sapan, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I-IV/b
NIP. 19720622200012 2 005

IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja terhadap apa yang menjadi komitmen yang tertuang dalam RENSTRA dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025. LKIP ini memuat tentang capaian kinerja sasaran dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur guna menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan- hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2025.

Pencapaian kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya Pelayanan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi)	96	Tinggi
CAPAIAN KINERJA (Rata-Rata)		96	Tinggi

Rata-rata capaian indikator kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun Anggaran 2025 sebesar **96%** atau dikategorikan **“Tinggi”**.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tahun 2025 sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam mengemban Misi ke-1 Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Periode Tahun 2025-2029 yaitu **“Membangun Ekonomi Berkelanjutan”** melalui upaya-upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Perekonomian, Sumber Daya Alam berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk tujuan pengembangan Ekonomi daerah dan Sumber Daya Alam.
- 3) Adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dengan dengan seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam rangka peningkatan Badan Usaha Milik Daerah, Perekonomian, Sumber Daya Alam untuk tujuan pengembangan Ekonomi daerah dan Sumber Daya Alam.
- 4) Dukungan fasilitasi dan pembinaan serta monitoring/evaluasi dari Pemerintah Provinsi NTT sebagai wakil pemerintah pusat di daerah terkhususnya melalui Biro Perekonomian dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi NTT dalam rangka peningkatan Badan Usaha Milik Daerah, Perekonomian, Sumber Daya Alam untuk tujuan pengembangan Ekonomi daerah dan Sumber Daya Alam.

- 5) Tersedianya regulasi perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman penyelenggaraan peningkatan kualitas Badan Usaha Milik Daerah, Perekonomian, Sumber Daya Alam untuk tujuan pengembangan Ekonomi daerah dan Sumber Daya Alam.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, dalam pencapaian kinerja tahun 2025 masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain :

1. Kurang adanya pemahaman tentang manfaat dan pentingnya Laporan Penyelenggaraan Program/Kegiatan Pembangunan Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung APBD. Kesepakatan hasil rapat pada awal tahun tidak ditaati.
2. Adanya perubahan-perubahan kegiatan pembangunan akibat pandemi efisiensi anggaran sehingga perlu dilakukan penyesuaian- penyesuaian berulang kali berakibat pada keterlambatan pelaporan dari perangkat daerah pengelola kegiatan.
3. Keterbatasan sarana prasarana kerja dan kompetensi sumber daya aparatur khususnya untuk kegiatan yang berbasis informasi dan teknologi.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun mendatang maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD dan UPTD pengelola kegiatan pembangunan.
2. Melakukan pelaporan berbasis teknologi aplikasi untuk mengantisipasi keterlambatan pelaporan.
3. Mengoptimalkan sumber daya aparatur dengan pendampingan.
4. Mengoptimalkan sarana prasarana pendukung dengan perbaikan dan pemeliharaan berkala.

Dalam pencapaian kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp. **677.144.044,- (Enam ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Puluh Empat Rupiah)** dan terealisasi sebesar Rp. **629.763.421,- (Enam ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah)** atau sebesar **93%**. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran belanja dalam pencapaian indikator kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 sebesar Rp. **47.380.623,- (Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Enam ratus Dua Puluh Tiga Rupiah)** dengan tingkat efisiensi sebesar **7,5%** atau dikategorikan **Efisien**. Selain itu, dengan **rasio rata-rata capaian indikator kinerja (100%)** terhadap **realisasi anggaran (93%)** menunjukkan tingkat efektifitas dalam **pencapaian indikator kinerja** Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 sebesar **1,03%** atau berada pada nilai rasio <1 sehingga dikategorikan **Kurang Efektif**.

Pencapaian kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar menyentuh sektor riil dan masyarakat , dimana APBD itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

Tambolaka, Februari 2025
Kepala Bagian Perekonomian dan
Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Sumba Barat Daya



Minawati L. Sapan, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I-IV/b
NIP. 19700622200012 2 005

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Iktisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Gambaran Umum	3
D. Dasar Hukum	9
E. Sistematika Pelaporan.....	9
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029.....	12
B. Indikator Kinerja Utama	17
C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	20
B. Capaian Kinerja	22
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	24
D. Kinerja Keuangan	34
BAB IV PENUTUP	40
LAMPIRAN – LAMPIRAN	42
1. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025	
2. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025	
3. POHON KINERJA TAHUN 2025	
4. RENCANA AKSI TAHUN 2025	
5. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN 2025-2029	
6. CASCADING INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	
7. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	
8. SK TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LKIP	

LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL 1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat/ Golongan dan Jenis Kelamin	5
Tabel 1.2.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Tabel 1.3.	Daftar Susunan Pegawai Negeri Sipil.....	6
Tabel 1.4.	Keadaan Peralatan kantor dan Aset Lainnya	8
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)	18
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025	19
Tabel 3.1.	Pengukuran Skala Ordinal Capaian Kinerja	21
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025.....	23
Tabel 3.3.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	25
Tabel 3.4.	Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Fisik Keuangan tepat waktu	26
Tabel 3.5.	Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	34
Tabel 3.6.	Realisasi Keuangan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025	35
Tabel 3.7.	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Indikator Kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya AlamSekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Susunan Organisasi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Sumba Barat Daya	4
Gambar 3.1. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025.....	23

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk dapat mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya sudah harus bergeser dari pola pikir berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan menjadi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kesejahteraan masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, maka Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada pihak yang memberikan amanah. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2025 ini akan menjelaskan tentang capaian dan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara mendetail sebagai masukan yang sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Adapun Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 adalah:

- a. Untuk menggambarkan sejauh mana capaian kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya selama Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan kinerja yang telah diperjanjikan.
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan instansi yang lebih tinggi tentang keberhasilan yang dicapai serta upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;
- c. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 meliputi 3 (tiga) aspek utama sebagai berikut:

- a. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** yaitu sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh dan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025.
- b. **Aspek Manajemen Kinerja** yaitu sebagai media untuk mendapat umpan balik terhadap setiap keberhasilan dan atau kegagalan kinerja yang ditemukan, sehingga kedepan dapat dirumuskan strategi dan pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
- c. **Aspek penerapan SAKIP** yaitu untuk mendorong menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara benar sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

C. Gambaran Umum

Tugas pokok dan fungsi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sesuai Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Perekonomian dan Sumber Daya Alam

2. Fungsi

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- 2) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- 3) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

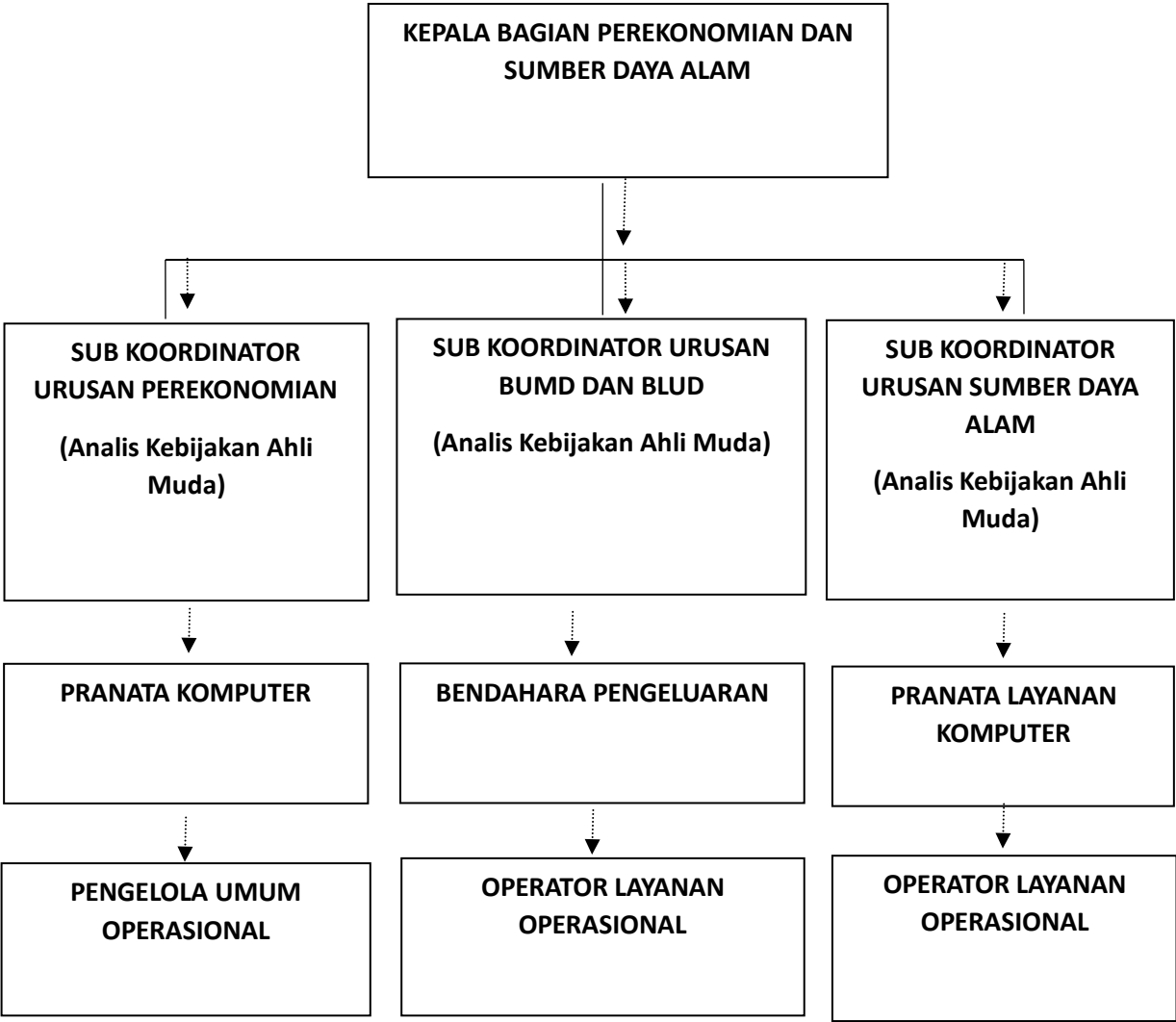
3. Struktur Organisasi

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Struktur Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya terdiri dari Kepala Bagian yang didukung oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yang berfungsi sebagai *supporting staf*, yaitu Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD, Sub Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Susunan Organisasi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya seba terdiri dari:

Gambar 1.1.
Susunan Organisasi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya



Keterangan : Keadaan 30 Desember 2025

4. Sumber Daya Manusia

Adapun jumlah kekuatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya saat ini berjumlah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Keadaan Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin

No	Golongan Ruang	Pangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	IV/b	Pembina Tk. I	-	1	1
Jumlah Golongan IV			-	1	1
2	III/d	Penata Tk.I	1	1	2
3	III/c	Penata	-	1	1
4	III/b	Penata Muda Tk.I	-	1	1
5	III/a	Penata Muda	3	2	5
Jumlah Golongan III			4	5	9
6	II/b	Pengatur Muda Tk.I	1	-	1
Jumlah Golongan II			2	-	2
TOTAL			6	6	12

Keterangan : Keadaan 30 Desember 2025.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 12 (dua belas) orang terdiri dari golongan IV sebanyak 1 (satu) orang, golongan III sebanyak 9 (sembilan) orang dan golongan II sebanyak 2 (dua) orang. Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2.
Keadaan Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	S2	-	1	1
2	S1	3	2	5
3	Diploma	-	3	3
4	SLTA/SMK	3	-	3
Total		6	6	12

Keterangan : Keadaan 30 Desember 2025.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 12 (dua belas) orang terdiri dari pendidikan S2 berjumlah 1 (satu) orang, S1 berjumlah 5 (lima) orang dan SMA/SMK berjumlah 3 (tiga) orang. Susunan kepegawaian pada Bagian Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3.
Daftar Susunan Aparatur Sipil Negara

No.	Nama	Jabatan / Golongan Ruang
1	Misnawati L. Sapan, S.Sos, M.Si	Kepala Bagian
	NIP. 19720622 200012 2 005	Pembina Tk.I - IV/a
2	Yohanes Dangga Ngara, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda Urusan Pembinaan BUMD dan BLUD
	NIP. 19741203 200801 1 011	Penata Tk.I, III/d
3	Lidia Milla, A.Md	Analisis Kebijakan Ahli Muda Urusan Perekonomian
	NIP. 19811213 200903 2010	Penata Tk.I, III/c
4	Wula Peda, A.Md	Analisis Kebijakan Ahli Muda Urusan Pembinaan BUMD dan BLUD
	NIP. 19690709 200012 2 001	Penata Tk.I, III/d
5	Nita Rambu Kanu Habar, A.Md	Bendahara Pengeluaran
	NIP. 19821110 201001 2 031	Penata Muda Tk.I - III/b
6	Yusfince Kondo, S.Th	Analisis Ahli Pertama
	NIP. 19970129 202505 2 003	Penata Muda, III/a
7	Stein Yosly M Kenda,S.Kom	Pranata Komputer
	NIP. 19890911 202321 1 026	Ahli Pertama - Pranata Komputer IX
8	Mukmina Indahari Horo, SE	Pranata Layanan Operasional
	NIP. 19701231 202521 2 024	IX
9	Samuel Japa Wiwi, SE	Pranata Layanan Operasional
	NIP. 19780215 202521 1 000	IX
10	Martinus Lende Timbu	Operator Layanan Operasional
	NIP. 19830308 200904 1 003	Penata Muda, III/a
11	Frans Bulu Kalumbang	Operator Layanan Operasional
	NIP. 19791017 202521 1 021	V
12	Bernardus Bora Dedo	Pengelola Umum Operasional
	NIP. 19780701 202521 1 042	III

Keterangan : Keadaan 30 Desember 2025.

5. Sarana Prasarana

Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

a. Kendaraan Dinas

Jumlah kendaraan dinas sebanyak 5 (lima) unit yang terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan roda empat dan 4 (empat) unit kendaraan roda dua yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Adapun perincian peruntukan dan pendistribusiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Kendaraan Bermotor Roda Empat, yaitu 1 unit Avanza Tahun 20071.5 GM/T Nomor Polisi ED 178 WC untuk kendaraan operasional kepala bagian yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Bagian.

- 2) Kendaraan Bermotor Roda Dua, terdiri dari:
- a) Sebanyak 1 (satu) unit Honda Mega Pro Nomor Polisi ED 2526 WC untuk kendaraan operasional dinas yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
 - b) Sebanyak 1 (satu) unit Honda NF11B2D1 Nomor Polisi ED 2526 WC untuk kendaraan operasional dinas yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Sub Bagian Perekonomian;
 - c) Sebanyak 1 (satu) unit YAMAHA 45P (BYSON) Nomor Polisi ED 2612 WC untuk kendaraan operasional dinas yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Bendahara Barang;
 - d) Sebanyak 1 (satu) unit Mega Pro Nomor Polisi ED 2000 WC untuk kendaraan operasional dinas yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Staf ;
- b. Peralatan Kantor dan Aset lainnya
- Sarana prasarana kedinasan berupa peralatan kantor dan aset seperti meubeler, komputer dan lain-lain yang dimiliki oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut :

No	Nama Barang	Merk	Tahun Perolehan
1	Camera Video	Canon / Digital	2008
2	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		2008
3	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Tiger	2008
4	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Tiger	2008
5	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Tiger	2008
6	Buffet Kaca	Lokal	2008
7	Buffet Kaca	Lokal	2009
8	Meja Kerja Kayu	Lokal	2012
9	Buffet Kayu	lokal / jati	2012
10	Lemari Kayu	lokal / lokal	2013
11	Meja Kerja Kayu	chitose / pabrik	2014
12	Meja Kerja Kayu	lokal / meja biro	2014
13	Sofa	sofa kulit / pabrik	2014

14	Lap Top		toshiba / c55d- aram4096 prosesor,a mda6.520 0	2014	
15	Kursi Besi/ Busa		chitosse	2016	
16	Wireless		Wireless / Portable office	2016	
17	Layar Film/Projector		svga / svga	2016	
18	Lap Top		asus / core i3 - 1115	2021	
19	Stabilizer/UPS		ups/stabili ser	2022	
20	External/ Portable Hardisk		toshiba / 1 tb	2023	
21	Laptop		Azuz	2024	

c. Rekapitan Sarana dan Prasarana

Tabel 1.4.
Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya

Nama/Jenis Barang	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Keadaan Barang (B/KB/RB)
Station Wagon	2007	158.928.000	Baik
Sepeda Motor	2008	25.190.000	Baik
Sepeda Motor	2009	24.937.000	Baik
Sepeda Motor	2012	13.609.200	Baik
Sepeda Motor	2015	23.000.000	Baik
Camera Video	2008	10.406.000	Baik
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2008	2.000.000	Baik
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2008	2.750.000	Baik
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2008	2.640.000	Baik
Kursi Kerja Pejabat lainnya	2008	825.000	Baik
Buffet Kaca	2008	5.000.000	Baik
Buffet Kaca	2009	3.125.000	Baik
Meja Kerja Kayu	2012	2.500.000	Baik
Buffet Kayu	2012	3.125.000	Baik
Lemari Kayu	2013	5.000.000	Baik
Lemari Kaca	2014	3.125.000	Baik
Meja Kerja Kayu	2014	5.000.000	Baik
Meja Kerja Kayu	2014	2.625.000	Baik
Sofa	2014	7.500.000	Baik
Lap Top	2015	10.120.000	Baik
Kursi Besi/ Busa	2016	8.625.000	Baik
Wireless	2016	12.365.000	Baik
Layar Film/Projector	2016	8.337.500	Baik
Lap Top	2021	10.250.000	Baik
Stabilizer/UPS	2022	1.745.000	Baik
External/ Portable Hardisk	2023	1.300.000	Baik
Laptop	2024	10.250.000	Baik

Keterangan : Keadaan 30 Desember 2025

D. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Ketetapan MPR Nomor 11/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan

E. Sistematika Pelaporan

LKIP Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Kata Pengantar Ikhtisar

Eksekutif Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum, dasar hukum, dan sistematika penyusunan LKIP Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025.

A. Latar Belakang.

Menguraikan mengenai ketentuan yang melandasi penyusunan LKIP

B. Maksud Dan Tujuan.

Menjelaskan dalam rangka maksud disusunnya LKIP dan tujuan yang diharapkan dari penyusunan LKIP.

C. Gambaran Umum.

Menjelaskan secara singkat gambaran umum Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya mengenai tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia dan sarana prasarana organisasi.

D. Dasar Hukum.

Menjelaskan mengenai peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan LKIP.

E. Sistematika Laporan.

Menjelaskan mengenai sistematika penyusunan LKIP.

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029

Pada bagian ini disajikan gambaran mengenai Renstra Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025- 2029, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

1. Pernyataan Visi dan Misi

a. Visi

Menguraikan mengenai definisi dari visi dan mengungkapkan pernyataan visi Pemerintah beserta kandungan maknanya.

b. Misi

Menjelaskan mengenai definisi dari misi dan menguraikan mengenai pernyataan misi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

2. Penetapan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Menjelaskan mengenai Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan dan akan dicapai oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.

- A. Kerangka Pengukuran Kinerja
Membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi dari setiap indikator kinerja.
- B. Capaian Kinerja
Menyajikan data yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja
- C. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja
Menyajikan metode dan hasil pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran dan hasil evaluasi yaitu dengan perbandingan target dan realisasi, perbandingan realisasi tahun sebelumnya dan tahun akhir RENSTRA.
- D. Realisasi Anggaran
Menyajikan ringkasan anggaran dan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 beserta rincian belanja per- program.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan dari LKIP

- A. Indikator Kinerja Utama.
Menjelaskan Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Formula Pengukurannya.
- B. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
Menguraikan sasaran, indikator kinerja sasaran dan targetnya pada masing – masing indikator kinerja Tahun Anggaran 2025.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Strategis Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025- 2029, dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka membangun sistem akuntabilitas dan kinerja sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan untuk memberikan arah dan pedoman Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Salah satu rencana pembangunan yang perlu disusun adalah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang diamanatkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 ayat (2) dan (3) yang antara lain menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029

RENSTRA Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah dokumen yang memuat suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada yang mungkin timbul. Penyusunan Renstra disamping mengacu pada RPJMD, juga perlu memperhatikan evaluasi kinerja Perangkat Daerah terhadap implementasi Renstra pada 5 (lima) tahun sebelumnya.

1. Pernyataan Visi dan Misi

a. Visi

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya mengarah pada perwujudan Visi Pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029, yaitu: ***“Terwujudnya Kabupaten Sumba Barat Daya hebat yang Berkarakter, Sehat, Cerdas, Berketahanan Pangan dan Berbudaya Menyongsong Indonesia Emas 2025”***.

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan, dapat mengenal Instansi Pemerintahannya serta mengetahui peran dan program-programnya untuk menentukan keberhasilan dimasa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya mengemban Misi ke-1 yaitu **“Membangun Ekonomi Berkelanjutan”**, dengan memperhatikan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Memadukan kesamaan persepsi pembangunan ekonomi yang terarah pada pembangunan ekonomi rakyat dan ekonomi daerah;
- b. Memadukan program pembangunan ekonomi yang terarah pada keberpihakan kepada rakyat untuk peningkatan dan perkuatan ekonomi;
- c. Meningkatkan kemitraan pembangunan ekonomi rakyat yang bertumbuh pada kekuatan rakyat, dunia usaha / swasta / LSM dan Pemerintah.

2. Pernyataan Visi Penetapan Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis.

Menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi perangkat daerah. Dengan diformulasikannya tujuan berdasarkan Visi dan Misi yang diemban, maka tujuan strategis Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah: **“Meningkatnya Pelayanan Administrasi Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.”**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran mempertimbangkan tugas dan fungsi serta tujuan strategis yang akan dicapai, maka sasaran Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yakni: **“Meningkatnya Pelayanan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam”**.

Berdasarkan sasaran diatas, maka kebijakan-kebijakan strategis Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya antara lain:

- a. Peningkatan kualitas koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan;
- b. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas terhadap administrasi; dan
- c. Peningkatan pembinaan dalam hal pengawasan dan rehabilitasi pemulihan cadangan sumber daya alam;

Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Arah Kebijakan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya :

- a. Komitmen dan konsistensi dalam pengelolaan anggaran, data, informasi dan pelaporan serta pengendalian di bidang ekonomi, Pembangunan dan sumber daya alam sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Peningkatan kapasitas Sumber Daya aparatur.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana.
- d. Peningkatan upaya rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam.
- e. Peningkatan upaya pengelolaan ekosistem pesisir dan laut.

3. Program dan Kegiatan.

Pencapaian Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dilaksanakan melalui 2 (dua) Program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Perekonomian dan pembangunan. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, sedangkan Program Perekonomian dan pembangunan terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, melalui Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, melalui Sub Kegiatan :
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, melalui Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah , melalui Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- e. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, melalui Sub Kegiatan :
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD ;
 - 2) Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
 - 3) Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
- f. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, melalui Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan yaitu:
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan;
 - 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

B. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Indikator Kinerja Utama Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator		Formula Pengukuran
Meningkatnya Pelayanan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi)	Jumlah Masyarakat yang puas terhadap kebijakan yang diterapkan
			Jumlah Total masyarakat yang di survei

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*)

C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai antara pihak yang menerima amanah/ tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberi amanah/tanggung jawab. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh organisasi akan dapat berguna untuk perencanaan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Perangkat Daerah akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*), Rencana Kinerja Tahunan, APBD Tahun Anggaran 2025, Strategi dan Prioritas APBD Tahun Anggaran 2025 dan DPA Tahun Anggaran 2025.

Adapun perjanjian kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025

No.	Sasaran		Indikator Kinerja	Target
1	2		3	4
1	Meningkatnya Pelayanan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi)	77%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrumen pertanggung jawaban secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program dan Kegiatan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Kerangka pengukuran kinerja dilakukan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi dari setiap indikator kinerja disertai dengan analisis capaian kinerja antara lain:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis RPJMD; dan
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Alat ukur pengukuran kinerja adalah dengan menggunakan indikator kinerja. Kerangka pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Capaian
Indikator Kinerja

=

Realisasi – (Realisasi – Rencana)

Rencana

x

100%

Atau :

Capaian Indikator
Kinerja

=

(2 x Rencana)– Realisasi

Rencana

x

100%

Selanjutnya untuk memudahkan dalam memberikan gambaran terhadap kinerja yang telah diperjanjikan maka penyimpulan hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran dan tujuan sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Pengukuran Skala Ordinal Capaian Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kategori
> 90	Sangat Tinggi
> 75 s.d 90	Tinggi
> 65 s.d 75	Sedang
≥ 50 s.d 65	Rendah
< 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas/kategori) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1) **Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi**
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- 2) **Hasil Sedang**
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal
- 3) **Hasil Rendah dan Sangat Rendah**
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Analisa hasil pengukuran capaian masing-masing indikator kinerja dinilai berikut:

Realisasi Kinerja $\geq$ Target Kinerja	:	Mencapai/Melampaui
Realisasi Kinerja $<$ Target Kinerja	:	Belum Mencapai Target

Realisasi Kinerja	>	Realisasi Tahun Sebelumnya	:	Peningkatan
Realisasi Kinerja	<	Realisasi Tahun Sebelumnya	:	Penurunan

Untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui efisiensi penggunaan anggaran yakni selisih persentase realisasi anggaran total alokasi anggaran, jika persentase efisiensi anggaran sebesar $>0\%$ maka dikategorikan “Efisien”, semakin besar persentase efisiensi anggaran maka penggunaan sumberdaya semakin efisien, sebaliknya jika persentase efisiensi anggaran sebesar $\leq 0\%$ maka dikategorikan “Kurang Efisien”.

Untuk mengukur efektifitas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui rasio persentase capaian kinerja sasaran terhadap persentase realisasi anggaran program pendukung, jika nilai rasio ≥ 1 maka dikategorikan “Efektif” dan sebaliknya jika nilai rasio <1 sehingga dikategorikan “Kurang Efektif”.

B. Capaian Kinerja

Mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025, maka capaian kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber
Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba
Barat Daya
Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Satu an	Target	Realisa si	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 = (5/4)x100	7
Meningkatnya Pelayanan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi)	%	80	77	96	Tinggi
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran				96	Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					96	Tinggi

Sumber : Olahan data Bag. Perekonomian dan SDA 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Capaian Indikator Kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sebesar **103 %** atau dikategorikan “Sangat Tinggi”, dengan rata-rata capaian indikator kinerja sasaran **Meningkatnya Pelayanan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam** sebesar 103% (Sangat Tinggi).

Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 menunjukkan bahwa:Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Tinggi*” sejumlah 1 (satu) indikator atau 103%.

- a. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Tinggi*” sejumlah 0 indikator atau 0%;
- b. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sedang*” sejumlah 0 indikator atau 0%;
- c. Indikator *kinerja* yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%; dan
- d. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 akan diuraikan berdasarkan aspek capaian kinerja sasaran sebagaimana secara umum telah diuraikan dalam penyajian capaian kinerja pada bagian sebelumnya.

SASARAN
Meningkatnya Pelayanan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Perencanaan program dan kegiatan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam meliputi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Perekonomian, Sumber Daya Alam berdasarkan Ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk tercapainya tujuan Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sumber Daya Alam dan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

Tabel 3.3.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pelayanan Bidang Perekonomian dan Sumber
Daya Alam

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RESN TRA 2029	% realisasi 2025 terhadap tahun 2024	% realisasi 2025 terhadap Target Akhir RENSTRA 2029
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengeluaran Perekonomian dan Pembangunan (Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi)	%	90	77	80	96	90	85	106,66
Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan						96	Tinggi		

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mengukur kinerja sasaran **Meningkatnya Pelayanan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam** terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi). Penjelasan atas capaian indikator kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

Kinerja Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi). adalah Jumlah Masyarakat yang puas terhadap kebijakan yang diterapkan dibandingkan dengan Jumlah Total masyarakat yang di survei x 100. Kegiatan Survei untuk mengetahui Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan perekonomian dilakukan di 11 (sebelas) Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka disimpulkan bahwa indikator Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi) pada tahun 2025 adalah 80%.

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Indikator Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi) mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2025, Indikator Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi) ditargetkan sebesar 77% dan terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 80%.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan uraian penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pelayanan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam** Tahun Anggaran 2025 sebesar **96%** atau dikategorikan **“Tinggi”**.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut :

1. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan Daerah yaitu Ibu Bupati Sumba Barat Daya dan Bapak Wakil Bupati Sumba Barat Daya dalam mengemban Misi ke-1 Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Periode Tahun 2025-2029 yaitu “Membangun Ekonomi Berkelanjutan”. melalui upaya-upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam.
2. Adanya dukungan fasilitasi dan pembinaan dari Pemerintah Provinsi NTT sebagai wakil pemerintah pusat di daerah terkhususnya melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam rangka mengoptimalkan pengembangan perekonomian di Daerah untuk meningkatkan layanan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.
3. Tersedia anggaran yang mencukupi sesuai kebutuhan, serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai.
4. Sumber Daya Manusia aparatur yang kompeten dan disiplin, serta kepemimpinan yang kuat.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain :

1. Kurang adanya pemahaman tentang manfaat dan pentingnya Laporan Penyelenggaraan Program/Kegiatan.
2. Adanya perubahan-perubahan kegiatan pembangunan akibat Efisiensi anggaran sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian berulang kali yang berakibat pada keterlambatan pelaporan dari perangkat daerah pengelola kegiatan.
3. Banyak Puskesmas yang belum mengajukan permohonan untuk menerapkan status menjadi BLUD Keterbatasan sarana prasarana kerja dan kompetensi sumber daya aparatur khususnya untuk kegiatan yang berbasis informasi dan teknologi.
4. Penggunaan sistem baru dalam pengelolaan keuangan daerah yang belum sepenuhnya siap dilaksanakan, sehingga menghambat penyerapan anggaran pada tiap OPD.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

1. Melakukan pelaporan berbasis teknologi aplikasi untuk mengantisipasi keterlambatan pelaporan.
2. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD yang berhubungan dengan kegiatan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
3. Mengoptimalkan sumber daya aparatur dengan pendampingan dan mengikuti Capacity Building.
4. Mengoptimalkan sarana prasarana pendukung dengan perbaikan dan pemeliharaan berkala.

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Perekonomian dan Pembangunan, yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, dan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, meliputi Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelola BUMD/BLUD, Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil, Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 565.319.800- (Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan ratus Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 526.367.658,- (*lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah*) atau sebesar 93%.

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2025 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pelayanan Bidang Perekonomian dan Sumber
Daya Alam

Capaian Kinerja Tahun 2025(%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung Tahun 2025 (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
96	93	7,00	Kurang Efisien	1,03	Efektif

an tabel diatas menunjukan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pelayanan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam** mencapai tingkat efisiensi sebesar 7,00% atau dikategorikan ***Kurang Efisien***. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio **1,03%** sehingga dikategorikan ***Efektif***.

D. Kinerja Keuangan

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientas untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, alokasi belanja diupayakan agar efisien, efektif dan proporsional. Belanja dikelompokan ke dalam Belanja Operasi dan Belanja Modal yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparaturnya maupun pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan Anggaran pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun Anggaran 2025 dilakukan untuk mencapai efektivitas pengelolaan belanja yang dijabarkan melalui target dan realisasinya maupun dari efisiensi dan efektivitas anggaran melalui belanja Operasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Realisasi Anggaran

Adapun realisasi keuangan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun Anggaran 2025 bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 dengan rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Realisasi KeuanganTahun Anggaran 2025

N o	Uraian				Pagu Anggaran (Rp)			Realisasi			
					Belanja Operasi	Belan ja Mod al	Jumlah	Jumlah	%		
1.	KEUANGAN										
2.	2.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH			111.824.244	0	111.824.244	103.395 763	92		
		2.1.2	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			23.834.000	0	23.834.000	22.438.500	94	
			2.1.2.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD			23.834.000	0	23.834.000	22.438.500	94
		2.1.3	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			11.955.000	0	11.955.000	9.504.540	79	
			2.1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.509.000	0	1.509.000	1.509.000	100
			2.1.3.1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			10.446.000		10.446.000	7.995.540	76
		2.1.4	KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			46.679.744	0	46.679.744	43.556.750	93	
			2.1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			46.679.744	0	46.679.744	43.556.750	93
		2.1.7	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			29.355.500	0	29.355.500	27.895.973	95	
			2.1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			29.355.500	0	29.355.500	27.895.973	95
3.	2.2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			565.319.800	0	526.367.658	526.367.658	93		
		2.2.1	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN			147.015.000	0	138.118.170	138.118.170	93	
			2.2.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi , Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelola BUMD/BLUD			21.660.000	0	20.960.000	20.960.000	96
			2.2.1.2	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			7.700.000	0	7.700.000	7.700.000	100
			2.2.2.1	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro			117.655.000	0	109.458.170	109.458.170	93
		2.2.3	2.2.3.1	PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM			418.304.800	0	388.249.488	388.249.488	92
			2.2.3.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			14.697.000	0	14.697.000	14.697.000	100
			2.2.3.2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			64.510.800	0	62.728.630	62.728.630	97
		2.2.3.3	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			339.097.000	0	310.823.858	310.823.858	91	
					TOTAL	677.144.044	0	677.144.044	629.763.421	93	

*Sumber : Laporan Keuangan Bagian Perekonomian dan Administrasi Sumber
Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun
Anggaran 2025.*

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukan bahwa secara umum pengelolaan keuangan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 terdiri atas alokasi anggaran Belanja Belanja Operasi sebesar Rp 677.144.044.,- (*Enam Ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu empat puluh empat rupiah*). dan terealisasi sebesar Rp.629.763.421,- (enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) atau sebesar 93%.

1.Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja.

Adapun gambaran efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7.
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Indikator Kinerja
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025

Sasaran	Indikator Kinerja		Capaian Kinerja Indikator (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung	Total Anggaran			Tingkat Efisiensi Kinerja			Tingkat Efektifitas Kinerja	
						Pagu (Rp)	Realisasi		Tingkat Efisiensi Kinerja		Kategori	Rasio % Capaian Kinerja Terhadap % Realisasi Keuangan	Kategori
							Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%			
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = 6 - 7	10	11	12 = 4 / 8	13
Meningkatnya Pelayanan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1.	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi) %	96	96	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN/Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam (Sub Kegiatan Koordinasi , Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelola BUMD/BLUD, Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup)	565.319.800	526.367.658	93,10	38.952.142	7,4	Kurang Efisien	1,03	Efektif
Kinerja Penunjang Lainnya			-	-	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Lainnya	111.824.244	103.395.763	92,46	8.428.481	7,54	Kurang Efisien	1,03	Efektif
Rata-Rata Capaian Kinerja			96	96	Total Anggaran	677.1440.44	629.7634.21	93	47.380.623	7,5	KURANG EFISIEN	1.03	Efektif

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total anggaran Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian indikator kinerja sebesar **Rp. 677.144.044,- (Enam Ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu empat puluh empat rupiah)** dan terealisasi sebesar **Rp. 629.763.421,- (enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) atau sebesar 93%**. Hal tersebut menunjukan bahwa terdapat efisiensi anggaran belanja dalam pencapaian indikator kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 sebesar **Rp.47.380.623,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah)** dengan tingkat efisiensi sebesar **7,00%** atau dikategorikan **Kurang Efisien**. Selain itu, dengan rasio rata-rata capaian indikator kinerja **(96%)** terhadap realisasi anggaran **(93%)** menunjukkan **tingkat efektifitas** dalam pencapaian indikator kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 sebesar **1,03%** atau berada pada nilai rasio <1 sehingga dikategorikan **Efektif**.

BAB IV

P E N U T U P

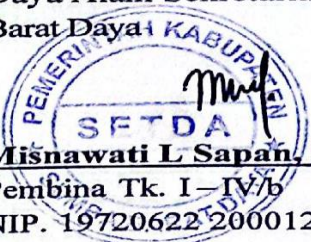
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh *stakeholders* kepada Pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategik (Renstra) yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pemerintah dalam hal ini dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah disajikan dalam Rencana Kinerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (Renstra).

Capaian Kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja ***Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi) sebesar 96%*** atau dikategorikan “Tinggi”. Meskipun demikian masih terdapat berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan capaian tersebut namun langkah optimalisasi sumberdaya dilaksanakan sehingga proses pelaksanaan program dan kegiatan benar-benar berhasil sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.

Pencapaian kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam APBD Kabupaten Sumba Barat Daya setiap tahun, dimana APBD itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

Tambolaka, Februari 2025

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber
Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Sumba
Barat Daya


Misnawati L Sapan, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19720622200012 2 005

LAMPIRAN - LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl.Ir. Soekarno No.– Tambolaka (87212) Nusa Tenggara Timur
Telp (0387) 24223,Fax(0387)..... E-mail:
T A M B O L A K A

RENCANA KINERJA TAHUNAN

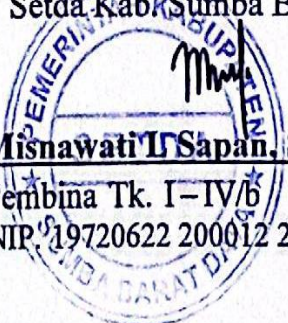
PERANGKAT DAERAH : BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER
DAYA ALAM SETDA KAB. SUMBA BARAT
DAYA

TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi) %	77 %

Tambolaka , Februari 2025

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA
Setda Kab. Sumba Barat Daya,


Misnawati I Sapan, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I–IV/b

NIP. 19720622 200012 2 005

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM				
		TUJUAN BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		
Meningkatkan Pelayanan Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam				
		SASARAN		
		Meningkatnya Pelayanan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		
		INDIKATOR		
		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi) %		

Analisis kebijakan Ahli Muda (Yohanes Dangga Ngara, SE)

Meningkatkan Pengadministrasian Hasil Pembinaan BUMD dan BLUD

Indikator:

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan BUMD dan BLUD

Analisis kebijakan Ahli Muda (Lidia Milla, A.Md)

Menyiapkan Data Harga Komoditi dan Data IPH BPS

Meningkatkan Pengendalian Inflasi Daerah

Indikator :

Jumlah Laporan ketersediaan Data Harga komoditi

Jumlah Laporan Pengawasan Kegiatan Pasar Murah

Analisis Kebijakan Ahli Muda (Wulla Peda, A.Md)

Meningkatkan Data Potensi Sumber Daya Alam

Meningkatkan Pengawasan Pertambangan dan BBM Bersubsidi

Menyiapkan Laporan dan Data Potensi Sumber Daya Alam

Menyiapkan Data Hasil Pengawasan BBM dan Pertambangan

Tambolaka , Februari 2025

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA
Setda Kab. Sumba Barat Daya,

Misnawati L Sapan, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I – IV/6
NIP. 19720622 200012 2 005